

M A K A L A H

PERDAGANGAN BEBAS GLOBAL DALAM PERSPEKTIF
FILSAFAT EKONOMI PANCASILA

MILIK PERPUSTAKAAN IKIP PADANG	
DITERIMA TOL :	24-12-96
SUMBER / AREA :	K /
KOLEKSI :	K1
NO INVENTARIS :	1260/K/96 P.1.02
NO. STAMPING :	201.3071 WAR P1

Oleh :

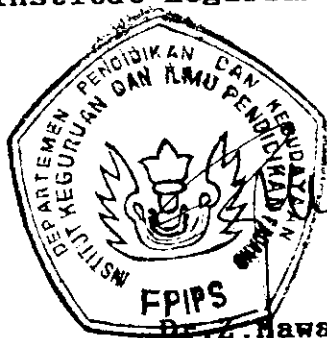
DRS. YUNIA WARDI, M.Si.



FAKULTAS PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
P A D A N G
1996

MILIK UPT PERPUSTAKAAN
IKIP PADANG

Diketahui Oleh :
Dekan Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial
Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Padang



[Handwritten signature]
Dr. Z. Hawardi Effendi, M.Pd.
NIP 130 517 796

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas berkat dan hidayah-Nya penulis dapat menyusun makalah yang berjudul : **Perdagangan Bebas Global Dalam Perspektif Filsafat Ekonomi Pancasila** yang isinya memuat tentang kesiapan Indonesia menghadapi perdagangan bebas global berdasarkan Filsafat Ekonomi Pancasila.

Walaupun demikian penulis menyadari, bahwa pemikiran yang telah diungkapkan dalam makalah ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan kritikan dan perbaikan dari berbagai pihak (pembaca) demi kesempurnaan makalah ini.

Atas perhatian dan kritikan yang diberikan dari berbagai pihak, penulis mengucapkan terima kasih.

Padang, Juli 1996

Penulis,

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
I. PENDAHULUAN	1
II. STRATEGI DAN KERBIJAKSANAAN INDONESIA DALAM MENG- HADAPI PERDAGANGAN BEBAS GLOBAL	5
1. Menciptakan Iklim Investasi yang Kondusif	9
2. Mengurangi Proteksi dan Subsidi	12
3. Meningkatkan Efisiensi dan Daya Saing Dunia Usaha Indonesia	14
4. Membentuk Aliansi Strategis dan Kerjasama Regional	17
5. Menciptakan Industri Berskala Menengah Indipenden	18
III. PELUANG INDONESIA DALAM PERDAGANGAN BEBAS GLOBAL .	20
IV. PERDAGANGAN BEBAS GLOBAL DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT EKONOMI PANCASILA	22
V. KESIMPULAN DAN SARAN	28
DAFTAR PUSTAKA	31

I. PENDAHULUAN

Istilah globalisasi bukan lagi merupakan sesuatu yang asing didengar oleh semua orang. Orang sudah mempunyai suatu persepsi, bahwa globalisasi adalah suatu kondisi yang ruang lingkungannya mendunia. Artinya, dunia yang luas ini tidak lagi berada pada sekat atau batas-batas tertentu. Orang semakin bebas melakukan sesuatu ke mana saja, sekalipun jaraknya jauh dan waktu tempuhnya memakan waktu yang cukup lama. Dalam era globalisasi, aktivitas ini dapat dilakukan oleh seseorang seolah-olah hanya dalam jarak beberapa meter dan dalam waktu hanya beberapa menit saja.

Aktivitas yang sama juga terjadi dalam ekonomi global, dimana orang akan bebas melakukan transaksi ekonomi tanpa dibatasi oleh batas-batas suatu negara, jarak, dan waktu. Dalam proses ekonomi global yang sedang melanda dunia dewasa ini telah menjadikan planet bumi menjadi kecil. Dengan kemajuan teknologi termasuk di bidang informasi, kejadian ekonomi di salah satu sisi bumi ini dengan cepat dan mungkin dalam waktu yang bersamaan dapat diketahui di belahan bumi lainnya. Tersedianya informasi yang semakin beranekaragam dan dengan harga yang relatif semakin murah telah mendorong para pelaku ekonomi untuk memanfaatkannya. Sistem transportasi dan perkembangan di bidang pengangkutan telah memungkinkan barang

berpindah dan atau dipindahkan selaras dengan peningkatan nilai tambah yang ingin diraih.

Sebagai salah satu implementasi dari ekonomi global ini dapat dilihat dari usaha ke arah aktualisasi liberalisasi perdagangan (perdagangan bebas) dunia yang sedikit demi sedikit kini sudah dimulai. Dalam mempercepat aktivitas ini, kini sudah banyak negara di berbagai kawasan mengadakan perjanjian multilateral dan kerjasama ekonomi dengan membentuk organisasi ekonomi regional (sekawasan) dan interregional seperti, misalnya di wilayah ASEAN dikenal dengan Perdagangan Bebas ASEAN atau Asean Free Trade Agreement (AFTA) yang akan dimulai tahun 2003, di wilayah Asia-Pasifik dikenal dengan Kerjasama Ekonomi Asia-Pasific atau Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) untuk negara maju akan dimulai tahun 2010, sedangkan untuk negara sedang berkembang termasuk *Indonesia* akan dimulai tahun 2020 dan secara mendunia (global) seperti, misalnya GATT yang sekarang dikenal dengan Organisasi Perdagangan Dunia atau World Trade Organization (WTO) dan masih banyak lagi organisasi lainnya.

Organisasi-organisasi di atas sebenarnya bertujuan untuk mewujudkan suatu kawasan ekonomi yang lebih terbuka, mengalir bebas dan lebih transparan di awal abad ke 21. Secara sederhana dapat tergambar, pada masa itu nanti arus perdagangan barang dan jasa lintas negara di kawasan ASEAN dan Asia-Pasific serta kawasan lainnya akan lebih mudah dan

murah. Arus barang ekspor dan impor tidak lagi dikenakan hambatan tarif dan non tarif yang tinggi (Sukartiono, 1995 : 13).

Ketika itulah akan dimulai dimensi baru dari suatu proses yang panjang, di mana perbatasan ekonomi suatu negara akan makin memudar. Patok-patok ekonomi di perbatasan yang diterjemahkan dengan rambu-rambu tarif dan non tarif harus semakin banyak dikurangi dan kalau bisa dicabut. Birokratisasi, perlindungan sepihak yang berkelanjutan, dan berbagai praktek lainnya yang dianggap merugikan mitra dagang akan dikecam sebagai suatu aktualisasi dari kontra liberalisasi perdagangan atau pasar bebas.

Indonesia sebagai negara berkembang dan berada di wilayah perdagangan bebas atau pasar bebas, baik perdagangan bebas atau pasar bebas yang ruang lingkungannya sekawasan seperti AFTA maupun yang lebih luas lagi seperti APEC dan WTO mungkin belum siap menghadapi perdagangan bebas tersebut. Ketimbang negara industri yang sudah maju, akan tetapi mau tidak mau harus ikut aktif berperan dan melibatkan diri dalam membentuk terwujudnya perdagangan bebas atau pasar bebas yang beradab dan berkeadilan. Jika tidak, tentu Indonesia akan tertinggal dan ditinggalkan oleh negara lain dalam proses era ekonomi global.

Sekalipun demikian, perlu diingat bahwa ide perdagangan bebas atau liberalisasi perdagangan ini lahir dari

teori pasar bebas dengan persaingan bebasnya. Kita mengenal salah satu bentuk pasar dengan persaingan sempurna yakni pasar persaingan sempurna (perfect competition market) dengan ciri-cirinya antara lain bebas keluar masuk, jumlah besar, dan produk homogen.

Ketiga ciri ini mudah dihafal tanpa kita tahu, bahwa sebenarnya dalam bebas masuk keluar itu terkandung paradigma *liberalisme* (paham bebas) dalam arti bebas masuk ke dalam kegiatan apapun dan bebas menyaingi dan menggusur yang lain manapun dengan daya saingnya yang lebih tangguh serta bebas keluar dalam arti terpaksa keluar karena bangkrut dan kalah bersaing dari saingan yang lebih tangguh (Swasono, 1995 : 23-24). Di lain pihak, Indonesia jelas akan menolak liberalisme tersebut karena tidak cocok dengan filsafat ekonomi Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang dikenal dengan paham Demokrasi Ekonomi yang lebih mengutamakan usaha bersama atas asas kekeluargaan dan memperhatikan hajat hidup orang banyak.

Berdasarkan uraian di atas, sebagai negara yang berfilsafat ekonomi Pancasila yang anti terhadap liberalisme sebagai konsep perdagangan bebas yang dianut oleh negara-negara maju, maka strategi dan kebijaksanaan apakah yang perlu dilakukan oleh Indonesia dalam menghadapi perdagangan bebas tersebut ?. Peluang-peluang apa yang dapat diperoleh oleh Indonesia dalam menghadapi perdagangan bebas tersebut ?. Sejujukanakah eksistensi nilai-nilai filsafat ekonomi Pancasila-

la dapat dipertahankan oleh Indonesia dalam mengaktualisasikan perdagangan bebas tersebut ?.

Dengan demikian, kajian ini bertujuan untuk menjelaskan tentang strategi dan kebijaksanaan yang perlu dilakukan oleh Indonesia dalam menghadapi perdagangan bebas, peluang yang bisa dimanfaatkan oleh Indonesia dalam era perdagangan bebas tersebut, dan pendirian Indonesia mempertahankan eksistensi nilai-nilai dan aturan-aturan yang digariskan oleh filsafat ekonominya yaitu Pancasila dan UUD 1945 dalam menghadapi perdagangan bebas global.

II. STRATEGI DAN KEBIJAKSANAAN INDONESIA DALAM MENGHADAPI PERDAGANGAN BEBAS GLOBAL

Dalam menghadapi perdagangan bebas global, Indonesia harus membuat suatu strategi yakni menciptakan suatu ketahanan ekonomi yang tangguh dalam menghadapi segala kebijakan yang terjadi dalam perdagangan bebas tersebut nantinya. Dengan memperkuat ketahanan ekonomi, Indonesia tidak akan mudah diperalat oleh negara lain untuk memaksakan kehendaknya guna mendapatkan keuntungannya sendiri dan dengan kondisi ini malahan Indonesia diharapkan dapat memainkan peran penting dan aktif dalam perdagangan bebas tersebut.

Kalau kita lihat keadaan ekonomi Indonesia akhir-akhir ini, memang menunjukkan suatu keberhasilan yang sudah terlihat nyata. Hal ini dapat dilihat dari laju pertumbuhan Produk

Domestik Bruto (PDB) Indonesia semenjak tahun 1971 hingga kini dapat dipertahankan di atas 5 persen per tahun.

Namun dalam melihat keberhasilan ini, perlu dipertimbangkan beberapa hal penting yang merupakan sebagai suatu kelemahan dalam menghadapi ekonomi global khususnya perdagangan bebas di masa yang akan datang (Slamet, 1995 : 18-19) yakni:

- a. Masih berlakunya proteksi bagi beberapa industri penting dalam negeri sebagai kelanjutan kebijakan pengembangan industrialisasi substitusi impor. Sebagai contoh, misalnya apa yang terjadi pada percepatan perdagangan bebas ASEAN (AFTA), Indonesia masih memanfaatkan skema *Temporarily Exclusion List* (TEL) yang membebaskan untuk sementara produk yang belum siap dari rencana percepatan perdagangan bebas. Indonesia memanfaatkan klausul TEL ini khusus untuk komo-ditas pertanian yang tidak diproses, dan sejumlah komoditas yang tata niaganya dikendalikan BUMN seperti BULOG atau swasta seperti Badan Penyangga dan Pemasaran Cengkeh (BPPC). Komoditas-komoditas yang dimaksud antara lain adalah cengkeh, beras, gula, bawang putih, terigu, gandum, kedelai, dan tepung terigu (Saragih, 1996 : 17). Adanya proteksi terhadap komoditas TEL tersebut belum tentu menguntungkan masyarakat konsumen Indonesia, malahan seba-liknya, adanya proteksi ini harga dari barang-barang tersebut bisa saja lebih tinggi daripada harga yang ada pada perdagangan bebas yang pada akhirnya semua akibatnya

- tentu akan ditanggung oleh masyarakat konsumen Indonesia.
- b. Efisiensi industri yang masih rendah yang disebabkan oleh kebijakan ketenagakerjaan dan perilaku industri itu sendiri. Efisiensi yang rendah tentu sangat mengurangi ketahanan industri tersebut dalam menghadapi perdagangan bebas. Dengan kondisi inefisiensi tersebut, perusahaan industri tidak mempunyai daya saing yang kuat dan hal ini sebenarnya sangat tidak mendukung industri tersebut untuk menghadapi perdagangan bebas yang penuh dengan kompetensi kompetitifnya.
- c. Masih adanya hasil/ produk pola industri yang hanya terdiri dari pengelompokan perusahaan kecil dan perusahaan besar yang di dalamnya juga terkait perusahaan menengah yang membentuk konglomerasi. Dilihat dari strategi menghadapi persaingan, pola yang demikian kurang menguntungkan. Perbedaan yang terlalu besar antara yang kecil dengan yang besar, menyebabkan linkage (keterkaitan) kurang terjadi. Walaupun terjadi linkage, yang tercipta adalah ketergantungan yang kecil terhadap yang besar. Kondisi ini akhirnya menjurus kepada pengelompokan kekuatan ekonomi tertentu yang mana akan mengurangi kekuatan ekonomi dalam menghadapi pasar bebas.
- d. Masih terdapat masalah serius ketenagakerjaan yakni pengangguran yang dikarenakan oleh jumlah penduduk yang besar dan pertumbuhan yang relatif tinggi. Walaupun tingkat investasi tinggi, namun komposisi industri yang ada

kurang dapat menyerap tenaga kerja yang cukup banyak tersebut.

Sekalipun kondisi ekonomi Indonesia memperlihatkan suatu pertumbuhan yang nyata, namun kondisi tersebut agaknya belum dapat dijadikan sebagai landasan yang kuat bagi ketahanan ekonomi nasional guna menahan serbuan perdagangan dari negara lain yang masuk secara global, karena pertumbuhan ekonomi yang telah dicapai tersebut masih dibangun atas dasar proteksi dan perlindungan pemerintah, inefisiensi, dan ketimpangan pola pengembangan dunia usaha serta tingginya pengangguran.

Tidak dapat disangkal lagi akan hal tersebut, belakangan ini memang banyak kalangan baik dari pakar ekonomi, pengusaha atau pelaku bisnis maupun birokratis meragukan akan kemampuan Indonesia dalam menghadapi perdagangan bebas global. Oleh sebab itu selagi masih ada waktu, Indonesia sebagai negara berkembang perlu kiranya untuk melakukan kebijaksanaan yang berupa evaluasi diri dan perbaikan-perbaikan ke arah kesiapannya menghadapi era perdagangan bebas global yang sudah semakin mendekat juga pada pelaksanaannya.

Sehubungan dengan itu ada beberapa kebijaksanaan yang perlu ditempuh oleh Indonesia guna memperkuat kemampuannya dalam menghadapi perdagangan bebas global nantinya, antara lain :

1. Mempersiapkan Iklim Investasi yang Kondusif

Kalau kita (Indonesia) menerima pendapat yang menyatakan, bahwa kunci untuk meningkatkan volume perdagangan adalah investasi, maka pemerintah Indonesia perlu mengambil inisiatif untuk menggalakkan kegiatan investasi tersebut dengan memberi kesempatan kepada investor asing maupun investor dalam negeri untuk menginvestasikan modalnya di Indonesia.

Dalam rangka menggalakkan investasi ini, akhir-akhir ini pemerintah telah membuat suatu gebrakan deregulasi di bidang investasi yang intinya adalah memberikan kesempatan kepada investor asing untuk menanamkan modalnya di daerah-daerah Indonesia secara langsung yang dikenal dengan paket *Foreign Direct Investment* (Investasi Langsung Asing). Hal ini merupakan suatu indikasi, bahwa pemerintah bertekad untuk meningkatkan nilai investasi di Indonesia. Namun hal ini akan terlaksana secara baik bilamana pemerintah bertekad dan mampu menyiapkan iklim investasi yang sifatnya kondusif terhadap investor tersebut.

Faktor kunci dalam mempersiapkan iklim investasi yang kondusif tersebut adalah menciptakan kerjasama yang bersifat kemitraan antara pemerintah dengan investor (swasta) dengan memberikan kepastian usaha, kepastian hukum yang tidak diskriminatif, keamanan berusaha, ketersediaan infrastruktur (misalnya, jalan yang baik, listrik, air bersih) dan menghapuskan segala pungutan yang tidak sah terhadap pengusaha

swasta (investor) sehingga tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi (high cost economy).

Untuk meningkatkan investasi tersebut terutama dalam hal penanaman modal asing (PMA) Sejauh ini pemerintah sudah memberikan kemudahan dan insentif kepada penanaman modal asing (PMA) di antaranya dalam hal (Saragih dkk, 1996 : 17):

- a. *Business Entry* yakni sudah semakin banyak sektor-sektor ekonomi yang kini bisa dimasuki PMA langsung. Hal itu terbukti dari semakin dikurangnya DNI (Daftar Negatif Investasi) bagi PMA.
- b. Tanah; kepada PMA diberikan jaminan penggunaan tanah untuk pendirian bangunan (Hak Guna Bangunan/HGB) untuk sektor industri dan Hak Guna Usaha (HGU) untuk perkebunan. HGB dan HGU itu kini bisa dijadikan sebagai agunan untuk mendapatkan jaminan ke Bank, sepanjang pemilikan tanah itu oleh PMA sebagai perusahaan dan bukan sebagai perorangan. Namun untuk konsesi penguasaan kehutanan dan pertambangan dikecualikan, tetapi diberikan jaminan atau hak untuk mengelola. Bedanya, lahan itu tidak bisa dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman ke bank.
- c. Perpajakan; diberikan hak untuk menghitung sendiri jumlah pajak pendapatan perorangan dan pajak perusahaan. Selain itu tingkat pajak pendapatan dan badan usaha semakin diturunkan, pengurangan atau pengembalian pajak dan kredit juga tersedia, pembebasan pajak atas *capital gain* dan

pajak atas deviden, keuntungan yang ditahan bebas dari pajak jika dana itu diinvestasikan kembali dan beban kerugian yang harus ditutupi dari keuntungan diberikan kelonggaran maksimum 10 tahun kemudian.

- d. Kawasan khusus; kawasan khusus seperti, *Bounded Zones* dan *Export Processing Zones* (kawasan/ zona pengolahan ekspor, di mana produk dalam negeri diolah lebih terpadu untuk bisa memenuhi kualitas dan kuantitas ekspor) disediakan untuk industri yang berorientasi ekspor. Biasanya kawasan ini sudah dilengkapi dengan sarana dan infrastruktur yang memadai, seperti jalan raya yang lancar dan memadai ke bandara/ pelabuhan ekspor.
- e. Perlindungan investasi dan hak milik intelektual; dimana Indonesia juga memiliki perlindungan hak milik intelektual yang disesuaikan dengan standar internasional. Undang-undang Merek dan Hak Cipta (copyright) sudah direvisi, demikian pula undang-undang Hak Paten sudah diperbarui. Untuk melindungi kepentingan PMA berdasarkan Undang-undang PMA tahun 1967, Indonesia sudah bergabung dengan International Arbitration Body dan The International Center for The Settlement of Investment Desputes. Untuk melindungi investasi dari risiko nonkomersial, Indonesia juga sudah bergabung dengan The Multilateral Investment Guarantee Agency yang merupakan bagian dari Bank Dunia.
- f. Orang Asing; kepadanya juga diberikan kesempatan menduduki

posisi sebagai dewan direksi, manajer, tenaga khusus di PMA dan juga di PMDN.

- g. Prosedur perizinan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (PMA) kini juga bisa ditempuh dalam waktu empat sampai enam minggu, sementara Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPM Daerah) mengeluarkan izin lokasi dan gangguan bangunan. Untuk memperpendek birokrasi di BKPD itu telah dilakukan pengurangan meja yang harus dilalui sejak tahun 1993.

Dalam kaitannya dengan penciptaan iklim investasi di daerah, pemerintah daerah harus berupaya untuk meningkatkan kualitas aparatnya, meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana pembangunan serta menyediakan jaminan perangkat perundang-undangan yang mendukung terciptanya iklim investasi dan berusaha yang sehat di daerah-daerah (Heruman, 1996 : 14).

2. Mengurangi Proteksi dan Subsidi

Sebenarnya untuk menghidupkan perekonomian dalam negeri salah satu cara yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah memberikan proteksi dan subsidi dengan berbagai paket deregulasinya kepada dunia usaha untuk memproduksi suatu produk dan jasa sehingga harganya dapat bersaing di pasar.

Kebijaksanaan ini memang kelihatan menguntungkan berbagai pihak di dalam negeri sendiri, namun hal ini tidak mungkin akan bisa dipertahankan selamanya *kecuali* Indonesia

mau menutup diri dari perekonomian yang bersifat global dan pemerintah mempunyai dana yang besar dan cukup untuk selalu melakukan subsidi.

Bilamana Indonesia ingin membangun perekonomiannya yang berorientasi global sehingga ia tidak terisolasi dan ditinggalkan oleh perkembangan ekonomi dunia, maka kebijaksanaan proteksi dan subsidi yang selama ini telah ditempuh sebaiknya secara bertahap atau sedikit demi sedikit perlu dikurangi dan bilamana dunia usaha Indonesia sudah dewasa dari segala aspek, maka tibalah saatnya proteksionisme dan subsidi itu dihapuskan. Sebab kita semua mengetahui, bahwa kebijaksanaan tersebut bukanlah suatu cara yang cocok untuk era perdagangan bebas yang akan membuat dunia usaha manja dan hanya bisa bersaing kalau ada proteksi dan subsidi (Aroef, 1995 : 3).

Jika dilihat dari segi masyarakat konsumen Indonesia, proteksionisme dan subsidi ini belum tentu dapat menguntungkan mereka sebab sekalipun harga produk dan jasa yang dihasilkan oleh dunia usaha sudah mendapatkan injeksi dengan berbagai kemudahan, keringanan, dan subsidi belum tentu harganya itu bisa bersaing dengan harga produk dan jasa yang ada di pasar global. Dan, mungkin harga produk dan jasa yang dihasilkan melalui proteksi dan subsidi tersebut lebih tinggi daripada harga yang tercipta pada pasar global.

Oleh karena itu, mengurangi atau menghapuskan proteksi dan subsidi tersebut menurut Bank Dunia adalah penting,

karena berbagai alasan di antaranya adalah dengan meletakkan landasan bagi kompetisi, maka selain akan memberikan manfaat lebih besar pada konsumen, pemerintah juga telah mendorong para produsen (dunia usaha) untuk menjadi lebih efisien (Samhudi, 1996 : 17).

3. Meningkatkan Efisiensi dan Daya Saing Dunia Usaha Indonesia

Pada umumnya efisiensi dunia usaha Indonesia terutama sektor industri belum tinggi. Hampir di semua industri manufaktur, peningkatan skala produksi tidak diikuti oleh penurunan biaya produksi per unit.

Untuk menghadapi perdagangan bebas global, dunia usaha Indonesia perlu meningkatkan efisiensinya sehingga setiap produk dapat dihasilkan dengan biaya produksi yang semakin menurun. Dengan demikian harga per unit produk akan semakin rendah dan hal ini dapat meningkatkan daya saing produk tersebut dari segi harga dalam transaksi perdagangan bebas global nantinya.

Peningkatan efisiensi ini dapat dilakukan dengan cara penciptaan iklim kerja yang kondusif, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) serta peningkatan kualitas sumberdaya manusia (Prasetyantono dkk, 1995:13). Iklim kerja yang kondusif dapat diciptakan melalui kebijaksanaan manajemen yang dapat mengoptimalkan tenaga kerja dan teknologi yang

ada melalui salah satu cara yakni memanfaatkan waktu yang tersedia sebaik mungkin.

Selain peningkatan efisiensi, untuk menghadapi perdagangan bebas global juga perlu adanya peningkatan daya saing dunia usaha Indonesia dari berbagai aspek. Sebagaimana diketahui, bahwa dalam era ekonomi global khususnya dalam perdagangan bebas, tingkat persaingan akan semakin tinggi. Pesaing-pesaing baru akan muncul yaitu pesaing-pesaing kelas dunia yang efisien dan produktif dalam berbagai aspek. Peningkatan persaingan ini bukan hanya berasal dari kemunculan baru, tetapi juga dari terbentuknya berbagai aliansi antar perusahaan bahkan antarpesaing.

Untuk dapat bersaing dalam perdagangan bebas global baik produk maupun jasa dihasilkan oleh dunia usaha Indonesia haruslah memiliki keunggulan dari berbagai aspek antara lain mutu, harga, dan pelayanan, namun sayangnya dari ketiga aspek ini daya saing dunia usaha Indonesia masih tergolong lemah (Ramto, 1996 : 4).

Menurut hasil survei yang dituangkan dalam laporan *World Competitiveness Report* yang dipublikasikan oleh *Institute for Management Development* (IMD), bahwa peringkat daya saing Indonesia makin turun dari urutan ke 34 tahun 1995 menjadi urutan 41 tahun ini. Dengan posisi tersebut di Asia, Indonesia terlampaui oleh Filipina yang tahun lalu masih di bawah Indonesia dan lebih parah lagi Indonesia makin tertinggal dari negara-negara seperti Malaysia, Thailand, dan Cina.

Kemerosotan daya saing Indonesia itu adalah yang terbesar di antara 17 negara yakni delapan tingkat (Sanjoyo dan Tjahja Gunawan, 1996 : 17). Dengan kondisi demikian, kita masih meragukan akan kemampuan daya saing Indonesia untuk menghadapi perdagangan bebas global nantinya, karena perdagangan bebas tersebut sangat membutuhkan daya saing yang tinggi.

Oleh karena itu, dalam rangka mengantisipasi persaingan global yang tinggi tersebut kiranya dunia usaha Indonesia perlu menciptakan keunggulan kompetitif nasional. Keunggulan tersebut di antaranya dapat diciptakan melalui usaha penguasaan Iptek dan peningkatan kualitas sumberdaya manusia (SDM) yang memiliki keterampilan, profesionalisme, dan moral.

Mengantisipasi tuntutan SDM yang bermutu tinggi, maka pendidikan memegang peran besar dalam menyiapkan kompetensi masa depan. Untuk itu, setidaknya ada tiga hal yang harus diselesaikan yaitu (1) pendidikan manajer-manajer Indonesia yang akan memimpin berbagai bisnis secara efektif bersaing di pasar global, (2) pengelolaan dan pengembangan sumberdaya manusia, dan (3) masalah etika bisnis (Prasetyantono, 1995 : 13).

Bertitik tolak dari kondisi yang demikian, untuk meningkatkan mutu sumberdaya manusia secara nasional ada dua hal yang patut dikemukakan yaitu : *Pertama*, langkah perluasan jangka waktu pendidikan dasar menjadi sembilan tahun merupakan langkah yang tepat untuk menghadapi perubahan lingkungan

bisnis di tingkat global. Namun pengembangan sekolah-sekolah di setiap daerah haruslah disesuaikan dengan kebutuhan daerah tersebut. *Kedua*, pihak-pihak swasta yang berusaha menyediakan pendidikan kejuruan dan teknis haruslah diberikan insentif dalam bentuk pengurangan pajak untuk semua pengeluaran yang berkaitan dengan pelatihan. Jika dua sebelumnya lebih menekankan pada bagaimana mendidik manusia, maka hal *ketiga* adalah etika bisnis yang lebih menekankan pada bagaimana para pelaku bisnis dapat merdeka dari keinginan untuk mengeruk keuntungan semata, sehingga harus mengorbankan pertimbangan moral dan etis. Dengan etika bisnis, para pelaku bisnis akan dimerdekakan dari pandangan yang sempit bahwa bisnis hanya untuk kepentingan bisnis. Akhirnya, para pelaku bisnis dapat bertindak merdeka dengan mempertimbangkan aspek etika bisnis.

4. Membentuk Aliansi Strategis dan Kerjasama Regional

Untuk menghadapi perdagangan bebas global, Indonesia perlu menciptakan aliansi strategis yang bisa saling mengisi kelemahan untuk meningkatkan daya saing menghadapi lawan baik aliansi itu terbentuk antara dunia usaha dengan dunia usaha, maupun aliansi negara dengan negara. Pepatah lama mengatakan bersatu menjadi teguh dan bercerai menjadi lemah.

Meskipun pemilihan partner untuk aliansi bisa dengan dunia usaha dan negara manapun di muka bumi ini, namun kedekatan letak antara partner juga sangat penting dipertimbangkan guna menekan biaya yang timbul karena jarak, maupun

karena berbagai gangguan yang timbul dibentangan jarak yang jauh.

Maka tidaklah salah kiranya aliansi strategis itu dilakukan sebanyak mungkin di antara dunia usaha dalam negeri dan negara-negara sekawasan dalam wujud kerjasama regional misalnya, seperti AFTA, APEC dan sebagainya. Kedekatan letak dengan partner juga memberikan keuntungan lain dalam bentuk perbedaan budaya yang tidak terlalu besar sehingga bisa menjadi lebih mudah untuk bisa mempersatukan partner-partner itu dalam aliansi. Waktu yang diperlukan untuk saling menyesuaikan diri bisa lebih cepat.

Oleh karenanya, *trend* persaingan yang akan terjadi adalah dalam bentuk persaingan antar blok ekonomi. Blok yang mempunyai banyak anggota tentu akan saling mengisi untuk menciptakan keunggulan strategi yang lebih baik.

5. Menciptakan Industri Berskala Menengah Indipenden

Ketahanan ekonomi Indonesia dapat dibangun melalui pemisahan industri skala menengah yang sebelumnya terintegrasi dalam industri berskala besar ke dalam struktur industri menengah yang independen, artinya mereka tidak terkait lagi kepemilikannya dengan usaha besar yang mengarah pada pemusatan kekuatan yang bersifat konglomerasi.

Dengan menciptakan industri berskala menengah yang independen akan dapat diciptakan ketahanan ekonomi yang mampu

menghadapi gejolak-gejolak yang akan terjadi dalam perdagangan bebas global nantinya, karena : 1) industri skala menengah mempunyai kebebasan bergerak dan berkembang lebih besar, 2) kemandirian usaha skala menengah, inovasi dan pengembangannya dapat dilakukan secara lebih cepat dan luas karena melibatkan masyarakat yang lebih luas dan mandiri, 3) jumlah perusahaan skala menengah yang dapat diciptakan akan jauh lebih banyak daripada jumlah perusahaan dalam struktur integrasi horizontal sehingga kondisi ini akan menciptakan peluang usaha yang lebih banyak, dan 4) jumlah perusahaan yang diciptakan banyak, maka ia akan mampu menyerap tenaga kerja yang jauh lebih banyak dengan tidak perlu mengurangi efisiensi industrinya, dan bahkan efisiensi tersebut dapat ditingkatkan.

Penciptaan struktur industri yang demikian adalah berguna untuk memperkuat struktur industri dengan cara membentuk keterkaitan yang luas dan usaha-usaha independen yang banyak. Struktur industri yang mengandung banyak usaha independen dan keterkaitan yang luas akan sulit untuk disaingi, karena ia merupakan jaringan yang menyangkut masyarakat luas. Daya saing struktur industri seperti ini mudah ditingkatkan karena fleksibilitasnya yang besar.

Pembentukan struktur industri yang demikian saja, tidaklah cukup bilamana tidak didukung oleh pengetahuan produksi yang seksama dari usaha-usaha yang ada. Oleh karena itu, untuk mendukung struktur industri tersebut perlu penge-

tahuan dan keterampilan produksi usaha, baik dalam bidang teknik, manajemen dan ekonomi.

Dalam kaitannya dengan manajemen produksi haruslah berlandaskan perilaku yang mudah diserap dalam budaya Indonesia, atau lebih baik bila ia merupakan bagian dari budaya Indonesia, tetapi setiap adaptasi haruslah disesuaikan sehingga mudah dimengerti oleh masyarakat.

Untuk bahan perencanaan masa depan, bahwa penyerapan tenaga kerja yang terbesar terdapat pada industri hilir dan industri antara. Oleh karena itu pengembangan industri berskala menengah independen sebaiknya diarahkan pada industri antara dan industri hilir agar sekaligus dapat membantu mengatasi masalah pengangguran.

III. PELUANG INDONESIA DALAM PERDAGANGAN BEBAS GLOBAL

Dalam rangka mewujudkan perdagangan bebas yang global, salah satu agenda GATT, AFTA, APEC adalah menurunkan tarif impor. Penurunan tarif impor di negara maju akan segera membuka peluang yang besar bagi dunia usaha Indonesia. Peluang ini hanya dapat dimanfaatkan, jika dunia usaha tersebut sanggup untuk merebut peluang itu.

Belakangan ini timbul kekhawatiran, di berbagai kalangan apakah liberalisasi perdagangan tersebut akan membawa keuntungan bagi Indonesia ?. Beberapa pendapat menyatakan,

bahwa kemungkinan kerugian-kerugian bisa saja muncul di berbagai sektor. Walaupun begitu, kita melihat keuntungan yang diraih dari perdagangan bebas itu akan lebih besar jika kita menjadi partisipan daripada berdiri di luar aktivitas perdagangan bebas.

Oleh karena itu Indonesia harus dapat mengoptimalkan keuntungan-keuntungan tersebut melalui peluang yang timbul oleh dampak adanya perdagangan bebas global. Adapun peluang yang dimaksud antara lain :

- a. Dengan penurunan tarif impor 5 % di Jepang, Australia, New Zeland, dan USA akan dapat memacu dunia usaha Indonesia untuk meningkatkan ekspor sehingga meraih pasar yang luas.
- b. Penurunan tarif impor Indonesia terhadap barang modal (mesin-mesin dan peralatan lain) secara efektif menurunkan biaya produksi terutama untuk industri skala menengah sehingga derajat kompetisi dunia usaha semakin meningkat.
- c. Karena dunia usaha Indonesia semakin berorientasi pada pasar global (ekspor), maka ada kemungkinan ia terdorong untuk mendiversifikasi produknya sesuai dengan perkembangan konsumsi domestik dan internasional. Diversifikasi produk ini dapat mengurangi risiko kegagalan pasar di luar dan di dalam negeri.
- d. Ambil alih atau transfer teknologi, informasi, dan manajemen lebih mungkin dilakukan dunia usaha Indonesia dalam sistem kemitraan bilamana perdagangan bebas dilakukan.

Dengan melihat peluang-peluang di atas, pemerintah Indonesia dari sekarang perlu melibatkan dunia usaha Indonesia dalam perundingan-perundingan yang menyangkut dengan peluang usaha berdasarkan suasana kemitraan.

IV. PERDAGANGAN BEBAS GLOBAL DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT EKONOMI PANCASILA

Dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diperoleh oleh masyarakat dunia telah terjadi pergeseran kepentingan yang dahulunya terfokus pada ideologi politik, maka kini telah berubah ke kepentingan ekonomi dan perdagangan. Kepentingan ekonomi dan perdagangan telah menimbulkan persaingan pasar yang ketat sekali di berbagai belahan dunia. Adanya persaingan yang ketat ini telah memaksa suatu negara membuka perdagangan barang dan jasa secara bebas dan kompetitif dari satu negara ke negara lainnya secara global.

Ide perdagangan bebas global dengan persaingan bebas ini muncul dan sengaja dilontarkan oleh masyarakat negara-negara industri maju yang berfalsafah Barat yaitu materialisme, intelektualisme, dan individualisme dengan sikap hidup untuk menentang, tidak puas, menguasai dan menaklukkan alam di dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Mereka bermotivasi konfrontatif dan dialektis; selalu tidak puas dengan apa yang dicapai dan dengan apa yang ada; lebih senang dengan istilah-istilah revolusioner, dinamis, moderen, *surprise*, luar biasa

dan lain-lainnya sehingga menimbulkan kejutan-kejutan dan persoalan-persoalan hidup lainnya.

Falsafah materialisme adalah suatu pandangan hidup yang lebih menekankan akan pentingnya benda-benda berujud sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan alat untuk mengukur kemajuan manusia. Falsafah intelektualisme adalah suatu pandangan hidup yang lebih menekankan pada perkembangan akal, intelek atau rasio untuk menentukan kemajuan masyarakat atau perkembangan seseorang dan mengabaikan perasaan dan kemauan. Falsafah individualisme adalah pandangan hidup yang lebih menekankan akan pentingnya manusia sebagai makhluk individu sebagai pengukur terhadap berhasilnya dan kemajuan lembaga-lembaga dalam masyarakat. Menurut falsafah ini fungsi lembaga-lembaga dalam masyarakat termasuk pemerintahan adalah untuk menjamin agar setiap individu dapat melaksanakan hak-hak dan kewajibannya secara baik dan tujuan hidupnya dapat tercapai sebaik-baiknya. Jadi, falsafah ini menekankan bahwa individu adalah primer, sedangkan masyarakat adalah sekunder. Individualisme sudah tentu mempunyai kaitan erat dengan *liberalisme*, karena hak-hak kebebasan merupakan hak-hak yang melekat pada setiap individu.

Oleh karena itu, pandangan hidup materialisme, intelektualisme, dan individualisme sudah tentu bertentangan dengan pandangan hidup bangsa Indonesia yakni Pancasila yang selalu menjunjung tinggi akan nilai-nilai keseimbangan, kese-

MILIK UPT PERPUSTAKAAN
IKIP PADANG

rasian, dan keselarasan. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan material dengan kepentingan spritual, antara kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat dan negara. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kemajuan atau perkembangan intelek, perasaan dan kemauan. Termasuk perasaan keindahan, perasaan cinta tanah air, kemauan untuk bekerja dan kemauan meningkatkan kehidupannya (Soetrisno, 1994 : 105).

Karena perdagangan bebas global ini muncul dan dilontarkan oleh masyarakat Barat, tentu ide yang terkandung dalam perdagangan bebas yang kini sedang didengungkan tersebut tidak luput pula dari nilai-nilai falsafah mereka yakni materialisme, intelektualisme, dan individualisme (liberalisme) serta dengan segala sikapnya yang secara jelas bertentangan dengan pandangan hidup bangsa Indonesia yaitu Pancasila dan UUD 1945.

Pancasila dalam bidang ekonomi menentang adanya *free-fight liberalism* dan *kapitalisme*. Liberalisme dalam hidup ekonomi membawa pengaruh perlombaan. Kapitalisme dilihat dari satu sisi merupakan alat eksploitasi yang merajai negara lain dalam pemasaran yang dapat menjelma menjadi penjajahan (imperialisme), sedangkan Pancasila dalam Pembukaan UUD 1945 jelas anti penjajahan. Jadi dalam penerapan ekonomi terutama dalam bidang perdagangan bebas dengan sendirinya Pancasila berprinsip anti *liberalisme*, *kapitalisme* dan penjajahan (Mangunpranoto, 1994 : 18).

Walaupun demikian, dengan sikap waspada dan hati-hati Indonesia tidak menolak proses globalisasi ekonomi terutama dalam bidang perdagangan bebas global. Politik isolasi bukan lagi merupakan pilihan, karena Indonesia akan tertinggal dan ditinggalkan. Oleh karena itu pendirian Indonesia tentang adanya era perdagangan bebas adalah setuju dan malahan ikut aktif berperan dalam mewujudkan perdagangan bebas yang berkeadilan dan beradab dengan sikap. Jika hal ini ditolak tentu Indonesia akan mendapat kerugian sendiri, karena bisa saja posisi Indonesia sebagai negara berkembang akan menjadi suatu negara yang tertutup ekonominya dan terisolasi dari perdagangan negara lain.

Sebagai negara yang berdasarkan falsafah Pancasila dan UUD 1945 sudah barang tentu negara Indonesia akan berpegang teguh kepada nilai-nilai yang menonjolkan paham kerjasama sebagai kekuatan ekonominya, apalagi setelah menghayati Pasal 33 UUD 1945 yang secara tegas berasaskan kerjasama dan kekeluargaan. Isi yang terkandung dalam falsafah ini jelas bertentangan sekali dengan *liberalisme* dan *kapitalisme* yang sangat menonjolkan individualisme dan persaingan.

Oleh karenanya, Indonesia dengan tegas menentang liberalisme dan kapitalisme sebagaimana ditegaskan oleh Presiden Soeharto bahwa liberalisasi yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia bukanlah liberalisme dan liberalisasi tidak sama dengan liberalisme. Ini berarti, bahwa Kepala Negara menolak

adanya liberalisme di Indonesia, akan tetapi bukan berarti menolak liberalisasi.

Penegasan Kepala Negara tersebut tertuang dalam pidatonya pada dies natalis ke 25 Universitas Indonesia yang berbunyi (Swasono, 1995 : 26) :

Masyarakat Pancasila adalah masyarakat yang sosialis-tis relegius dengan ciri-ciri pokok : tidak membenarkan adanya kemelaratan, keterbelakangan, perpecahan, pemerasan, kapitalisme, feodalisme, kolonialisme dan imperialisme; karenanya harus bersama-sama menghapuskannya dan - menghayati hidupnya dengan berkewajiban : takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cinta pada Tanah Air, kasih sayang pada sesama manusia, suka bekerja dan rela berkorban untuk kepentingan rakyat.

Adanya penegasan Kepala Negara itu, tugas kita sebagai bangsa Indonesia semakin berat, karena hal ini berarti bangsa Indonesia harus lebih teliti mengamati mana saja tindakan liberalistik yang di dalam perekonomian Indonesia yang sebenarnya mengandung liberalisme. Untuk itu, kita harus mengamati ciri liberalisme dan kapitalisme tersebut yang di antaranya adalah mengutamakan kepentingan sendiri (individual), kebebasan sebebaskan-bebasnya, dan mau menang sendiri, haus kekuasaan serta ketamakan ekonomi dan berakhlak *economic animal* murni.

Demi mempertahankan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila agar tidak terpengaruh oleh liberalisme dan kapitalisme tersebut dalam kaitannya perdagangan bebas dunia, Indonesia harus bersikap tegas dan eksplisit, minimal memperhatikan dengan sungguh-sungguh beberapa hal berikut ini sebagai sikap hati-hati dan waspada (Swasono, 1995 : 29) :

1. Indonesia harus menolak terjadinya proses dominasi dari negara ekonomi kuat terhadap negara yang lemah.
2. Indonesia harus mampu mentransformasi proses perdagangan bebas itu menjadi proses interdependensi, dan menangkis dependensi yang menjadi sumber neo-eksploitasi.
3. Indonesia harus tetap tangguh dan sadar kedaulatan. Kepentingan nasional Indonesia harus menjadi tolok ukur utama. Indonesia tidak boleh menjadi lunak sekedar agar nampak rukun dalam hubungan antar negara dalam menerima liberalisasi perdagangan dari luar ataupun memanfaatkan liberalisasi perdagangan ke luar. Kesemuanya itu harus berdasarkan syarat dan kepentingan Indonesia, bukan syarat dan kepentingan mereka.
4. Indonesia menolak perdagangan bebas global yang berdasarkan liberalisme dan kapitalisme, karena tidak sesuai dengan filsafat ekonomi Indonesia yaitu Pancasila dan UUD 1945.

Tanpa sikap hati-hati dan waspada seperti yang dikemukakan di atas, Indonesia akan sulit menghadapi persaingan dunia. Penyakit utama ekonomi harga tinggi (high cost economy) bukanlah sekedar masalah teknis ekonomis yang relatif lebih mudah diatasi, tetapi lebih merupakan masalah politik dan budaya.

Untuk itu diperlukan penyegaran dan pembaruan guna mengatasi ketidakefisienan ekonomi nasional yang sumbernya

terletak pada dasar kehidupan politik dan budaya bangsa Indonesia. Penyalahgunaan kekuasaan, ketertutupan, komersialisasi jabatan, keangkuhan birokrasi, kolusi, korupsi, feodalisme canggih, nepotisme aktif, eksploitasi, supresi, pemerasan cultuurstelselisme, servilisme dan ketundukan terhadap pihak barat adalah masalah politik dan budaya yang memberi substansi pada ekonomi biaya tinggi yang tentu menurunkan daya saing.

Berawal dari sinilah, ekonomi dunia akan menggerogoti perekonomian nasional Indonesia melalui liberalisasi perdagangan. Di satu pihak impor Indonesia tentu akan terdorong makin besar, lebih cepat dan menyedot daya beli nasional secara drastis. Di lain pihak, ekspor Indonesia akan memiliki kandungan impor yang makin tinggi.

Oleh sebab itu, keberhasilan Indonesia menghadapi keterbukaan ekonomi terutama dalam bidang perdagangan bebas tidak tergantung pada retorika dan tekad politik seperti yang ada selama ini, tetapi sangat ditentukan oleh keberanian politik secara riil untuk melakukan perombakan, baik di bidang teknis, ekonomis, politik maupun budaya.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Dalam menghadapi perdagangan bebas global, Indonesia harus menciptakan ketahanan ekonominya dengan berbagai kebijaksanaan di antaranya menciptakan iklim investasi yang kondusif, mengurangi proteksi dan subsidi kepada dunia usaha, meningkatkan efisiensi dan daya saing dunia usaha, membentuk aliansi strategis dan kerjasama regional serta menciptakan industri berskala menengah yang independen.
- b. Dalam perdagangan bebas global, Indonesia akan berpeluang untuk :
- 1). Meningkatkan eksportnya sehingga meraih pasar yang luas.
 - 2). Meningkatkan derajat kompetisi dunia usahanya.
 - 3). Mendorong dunia usaha Indonesia mendiversifikasi produknya sesuai dengan perkembangan konsumsi domestik dan internasional sehingga dapat mengurangi risiko kegagalan pasar di luar dan di dalam negeri.
 - 4). Adanya kemungkinan mengambil alih atau transfer teknologi, informasi, dan manajemen dunia usaha Indonesia dalam suasana sistem kemitraan.
- c. Indonesia menolak liberalisme dan kapitalisme yang ada pada perdagangan bebas global karena bertentangan dengan filsafat ekonominya yakni Pancasila dan UUD 1945, namun ia mendukung proses liberalisasi perdagangan global. Sebab liberalisasi perdagangan global yang diterapkan oleh

MILIK UPT PERPUSTAKAAN
IKIP PADANG

Indonesia tidaklah sama dengan perdagangan bebas yang berpaham liberalisme dan kapitalisme (liberalisasi tidak sama dengan liberalisme).

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, dapat disarankan sebagai berikut :

- a. Dalam menghadapi perdagangan bebas global nantinya, pemerintah Indonesia mulai dari sekarang memikirkan untuk mengurangi proteksi dan subsidi yang menguntungkan pihak produsen (dunia usaha) yang bisa menghalangi percepatan proses perdagangan bebas yang akhirnya bisa merugikan konsumen dalam negeri. Di samping itu, pemerintah sudah seyogianya menciptakan industri berskala menengah independen, guna memperkuat akar perekonomian Indonesia dalam menghadapi perdagangan bebas. Dan kalah pentingnya, Indonesia harus meningkatkan daya saingnya dengan cara meningkatkan kualitas sumberdaya manusianya, sehingga dapat memanfaatkan peluang-peluang ekonomi dan bisnis yang diakibatkan oleh adanya perdagangan bebas.
- b. Walaupun demikian, eksistensi nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 tetap dipertahankan. Untuk itu perlu suatu upaya pemerintah guna meningkatkan penghayatan dan pengamalan para pelaku ekonomi dan bisnis Indonesia terhadap Pancasila dan UUD 1945.

DAFTAR PUSTAKA

- Aroef, Matthias.1995. **Perspektif Teknologi Kerjasama Sosbud & Ekonomi Menuju Abad Ke-21**. Makalah Seminar Univesitas Pasundan Bandung dan Curtin University, Perth, Australia di Bandung, 7 Januari 1995.
- Heruman, Herman.1996. **Peranan Sektor Swasta Dalam Kegiatan Investasi Daerah Menuju Era Globalisasi**. Makalah Seminar Nasional Ekonomi Global dan Politik Lokal Indonesia dalam rangka Dies Natalis XXII Ilmu Pemerintahan FISIP, UNPAD 29 Mei 1996 di Bandung.
- Mangunpranoto, Ki Sarino.1994. "Dasar Filsafat Ekonomi Pancasila" dalam Mubiyarto dan Boediono (Ed) **Ekonomi Pancasila**. Edisi 1. Yogyakarta : BPFE.
- Prasetyantono, Toni dkk.1995. "Antisipasi Perkembangan Terhadap Ekonomi Global" dalam **Kompas** 24-10-1995, halaman 13.
- 1995. "Jadikan Pendidikan Berkualitas sebagai Keunggulan Kompetitif" dalam **Kompas** 25-10-1995, halaman 13.
- Ranto, Bun Yamin.1996. **Dinamika Ekonomi Global dan Reorientasi Politik Lokal**. Makalah Seminar Nasional Ekonomi Global dan Politik Lokal Indonesia dalam rangka Dies Natalis XXII Ilmu Pemerintahan FISIP, UNPAD 29 Mei 1996 di Bandung.
- Samhudi, Sri Hartati.1996. "Agenda Deregulasi yang Menunggu Dituntaskan" dalam **Kompas** 21-5-1996, halaman 17.
- Sanjoyo, Anton & Tjahja Gunawan.1996. "Peringkat Daya Saing Indonesia Makin Turun" dalam **Kompas** 30-5-1996, halaman 17.
- Saragih, Simon.1996. "Di Balik RENDahnya Nilai Ekspor Indonesia ke ASEAN" dalam **Kompas** 4-5-1996, halaman 17.
- Saragih, Simon dkk.1996. "Fasilitas dan Kemudahan Bagi Investor Asing" dalam **Kompas** 15-5-1996, halaman 17.

- Slamet, Soemirat. 1995. "Indonesia Dalam Menghadapi Era Perdagangan Bebas" dalam *Majalah Karya Vira Jati*. Bandung : Penerbit Seskoad.
- Soetrisno, PH. 1994. "Sekelumit Tentang Ekonomi Pancasila Ditinjau Dari Segi Sosio-Kultural" dalam Mubiyarto dan Boediono (Ed) *Ekonomi Pancasila*. Edisi 1. Yogyakarta : BPFE.
- Sukartiono, Bambang at.all. 1995. "APEC, Gaya Hidup Berformasi Angsa Terbang" dalam *Kompas* 17-5-1995 halaman 13.
- Swasono, Sri Edi. 1995. "Mewaspadaai Pasar Bebas" dalam *Majalah Karya Vira Jati*. Bandung : Penerbit Seskoad.